

# Pencerahan atas Fatwa MUI

Kontribusi dari Administrator

Berkenaan dengan kontroversi fatwa MUI beberapa bulan lalu, wawancara berikut ini pernah dimuat di Majalah Gontor dan kembali kami tampilkan di website ini, mudah-mudahan menjadi bayan yang komprehensif terutamanya tentang pluralisme dan liberalisme.

Apa dan bagaimana komentar Bapak soal fatwa MUI mengenai diharamkannya pluralisme dan liberalisme tersebut?

Saya melihat fatwa MUI kali ini merupakan kemajuan luar biasa. Sebab fatwa itu berkaitan dengan masalah pemikiran. Pengharaman suatu pemikiran lebih banyak memerlukan dalil-dalil aqli, ketimbang naqli. Rujukannya bukan kitab Fiqih, tapi kitab-kitab tentang aqidah, kalam dan falsafah serta pemikiran filsafat Barat yang menjadi sumbernya. Memang di zaman ghazwul fikri sekarang ini diperlukan fatwa-fatwa tentang pemikiran. Dan itu sah-sah saja asalkan pijakannya kuat dan alasannya argumentatif.

Apa pandangan Bapak sendiri soal pluralisme?

Menurut saya pluralisme yang diharamkan MUI itu harus difahami dari dua konteks. Pertama, dalam konteks wacana liberal yang akhir-akhir marak dikalangan cendekiawan muda, dan yang jelas-jelas menyuarakan kesamaan agama-agama, menentang keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan mengusung prinsip bahwa kebenaran (termasuk kebenaran agama) itu relatif. Kedua, dalam konteks konsepsi pluralisme agama yang berkembang di Barat, Paham pluralisme yang paling menonjol adalah konsep global theology nya John Hick atau world theology nya Cantwell Smith, dan konsep transcendent unity of religion Fritjhof Schuon. Konsep John Hick dan Smith ini adalah produk dari wacana Protestan Liberal, dan pendukung program globalisasi. Kalau fatwa MUI dipahami dari kedua konteks diatas maka ia sangat relevan. Dan saya yakin kalau paham ini dikaji dengan baik siapapun yang bergama dengan benar-benar akan menolaknya. Kalangan Kristen sendiri juga menolak pluralisme agama seperti itu. Untuk lebih detail mengenai kritik terhadap pluralisme agama ini selahkan anda baca ISLAMIA edisi 3 & 4.

Adakah konsep Islam mengenai pluralisme? Bagaimana kalau ada, pandangan Islam mengenai pluralisme?

Pertanyaan ini tidak tepat, sebab pluralisme itu paham yang berasal dari Barat. Dari akar katanya saja sudah jelas. Ini sama dengan pertanyaan bagaimana konsep komunisme dalam Islam atau bagaimana konsep zakat dalam agama Hindu. Konsep itu tidak ada dalam ajaran agama Islam dan tidak compatible dengan Islam. Tapi saya maklum pertanyaan seperti ini memang fenomenal. Sebab derasnya arus pemikiran asing dan konsep-konsepnya kedalam dunia Islam memaksa ummat Islam untuk menjustifikasinya. Inilah sebenarnya yang biasa kita sebut kebingungan konseptual (conceptual confusion). Yang ada dalam Islam adalah pandangan terhadap adanya pluralitas agama, bukan kebenaran agama-agama (pluralisme agama). Dalam sejarahnya Islam berdampingan dengan agama lain secara damai dan tidak ada masalah. Tapi di Barat, jangankan dengan agama lain, antar sekte agama mereka sendiri saja sudah tidak damai. Peristiwa inkuisi dalam Kristen dan pengutukan Krsiten terhadap Yahudi dimana-mana hingga kini sudah membuktikan hal itu. Dari situlah kemudian muncul gagasan pluralisme agama. Jadi pluralisme agama itu sebenarnya timbul dari pengalaman manusia Barat dan tidak dialami ummat Islam.

Bagaimana bila pluralisme dikaitkan dengan agama yang ada di Indonesia? Bagaimana pendapat Bapak?

Definisi pluralisme dalam Oxford Dictionary of Philosophy mengandung elemen realitivisme. Dan ketika dikaitkan dengan agama pluralisme menjadi prinsip agar tidak ada klaim kebenaran oleh setiap agama. Keberagaman orang di Indonesia lain dengan di Barat. Intensitas ketaatan ummat beragama di Indonesia lebih besar. Artinya fanatisme terhadap agama masing-masing seperti itu tidak mungkin menerima ide pluralisme seperti ini. Ya kalau keyakinan terhadap agama direduksi agar lebih bersikap toleran, berarti kita harus beragama secara ragu-ragu. Saya tidak yakin semua penganut agama, khususnya di Indonesia akan menerima doktrin ini. Prinsip relativisme kebenaran tidak mungkin bisa diterima. Kalau prinsip bahwa suatu agama harus mengakui keberadaan agama lain, bersikap toleran dan saling memahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bukan pluralisme agama namanya. Dan saya kira bukan itu yang diharamkan MUI.

Bagaimana sikap Bapak tentang pluralisme yang ada di Indonesia? Bagaimana seharusnya sikap umat Islam Indonesia memandang pluralisme itu sendiri?

Kalau anda berbicara pluralisme dalam kaitannya dengan budaya, suku, dan ras itu lain cerita. Tapi yang saya tahu konsep pluralisme budaya di Indonesia belum ada yang membuat. Jadi sulit untuk diapresiasi. Kalau pluralitas budaya dan bangsa sikap Islam dan ummat Islam sudah jelas, ajaran al-Qur'an juga jelas.

Kalau tentang liberalisme bagaimana pandangan Bapak? Apakah Islam mengenal konsep liberalisme? Kalau ada bagaimana?

Sama dengan pluralisme, liberalisme juga tidak ada akarnya dalam Islam. Kalau memang ada akarnya dalam Islam

sudah tentu konsepnya bisa dikaji lebih dulu secara etymologis. Liberalisme yang asli dari Barat itu adalah produk dari gelombang posmodernisme. Posmodernisme banyak muatannya, diantaranya relativisme, anti-otoritas, non-struktural, kesetaraan gender (equality) dan juga pluralisme. Liberalisme dalam agama juga merupakan gerakan keagamaan dalam Kristen Protestan yang tidak bisa kita adopsi. Sebab pergumulan teologis dalam Kristen dan dalam Islam itu sangat berbeda. Liberal itu artinya bebas, sementara Islam itu berarti berserah diri dan mengikatkan diri dengan din ul Islam. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk din al-Islam atau tidak, tapi tidak memberi kebebasan menafsirkan Islam sesuai dengan keinginannya. Semua ada aturannya. Jangankan masuk dalam suatu agama, sekali masuk kedalam sebuah rumah tangga saja kita tidak bisa bebas sebebasnya. Jadi Islam tidak mengenal istilah atau gerakan yang disebut liberalisme. Tapi anti-liberalisme tidak serta merta mendukung absolutisme, ini cara berfikir yang khas Barat. Kebebasan dalam Islam disebut ikhtiyar, akar katanya adalah khayr (baik), artinya bebas memilih antara yang baik dan yang buruk. Untuk memilih yang baik dari yang buruk tentu harus dengan ilmu. Kalau tidak tahu mana yang baik dan yang buruk, seseorang tidak bisa bebas memilih. Jikapun dalam kondisi seperti itu ia diberi kebebasan, maka ia bertentangan dengan fitrah-nya. Sebab fitrahnya manusia itu baik dan akan memilih yang baik. Jika masyarakat tidak tahu memilih yang baik dari yang buruk tugas ulama untuk memberitahunya. Sebab jika ummat sesat, yang pertama bertanggung jawab adalah ulama&rsquo; nya.

Bagaimana umat Islam harus menyikapi adanya liberalisme itu sendiri?

Kalau liberalisme ini diadopsi ummat Islam lalu melahirkan pemikiran-pemikiran yang menggugat syariat Islam, aqidah Islam, otoritas ulama, dan bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan, sudah tentu ini berbahaya. Ini bisa mengakibatkan kekufuran. Jika manusia diberi kebebasan untuk mempertanyakan segala sesuatu tentang Tuhan tanpa batas, ia telah melampaui batas kemanusiaannya. Tuhan tidak memerintahkan hal ini. Di Barat sejarah ateisme juga berasal dari sikap liberal seperti itu. Kajian Michael Buckley dalam *At The Origin of Modern Atheism* membuktikan bahwa ketika orang mulai mempertanyakan orisinalitas Bible, mereka lalu berani mempertanyakan konsep teologinya. Ketika pertanyaan bebas itu tidak terakomodasi, maka para penanya akan menjadi atheis. Gejala ini sudah mulai nampak dikalangan Muslim Liberal. Ummat Islam harus bersikap tegas dalam mencegah hal ini. Sudah tentu bukan dengan sikap emosional, tapi harus secara akademis, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Fatwa MUI saya rasa sangat tepat. Hanya saja ia perlu disusul dengan buku putih yang menjelaskan lebih detail tentang paham ini

Bagaimana sikap Bapak tentang sebagian golongan Islam yang menolak fatwa MUI itu?

Saya melihat yang menolak bukan golongan, itu hanya segelintir anggota masyarakat Islam saja. Dan itu bukan representasi ummat Islam atau golongan ummat Islam. Secara substantif, argumentasi penolakannya juga tidak mendasar dan cenderung emosional. Mestinya masalahnya bisa diselesaikan dengan mengklarifikasi makna definitif dari paham-paham yang diharamkan itu. Sayangnya penolakan itu tidak merujuk kepada substansi fatwa, tapi hanya implikasinya yang masih bersifat asumsi. Asumsi belum tentu benar. Debat yang diselenggarakan oleh sebuah Radio swasta di Jakarta baru-baru ini, juga tidak menyentuh makna istilah liberalisme dan pluralisme itu secara mendalam. Bahkan ada pemrotos yang tidak tahu tentang Ahmadiyah ketika menolak fatwa itu. Ini menurut saya menunjukkan lemahnya tradisi ilmu dalam tubuh ummat Islam.

Forum Ulama Indonesia (FUI) menyatakan bahwa kalangan Islam Liberal harus dibubarkan. Karena bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana sikap Bapak tentang hal tersebut?

Sebenarnya NU wilayah Jawa Timur telah lebih dulu memutuskan hal itu. Dan kalau tidak salah Muktamar NU di Boyolali juga mengindikasikan hal yang sama. Pimpinan organisasi NU dan Muhammadiyah terpilih juga sudah merupakan bukti penolakan ummat terhadap tokoh liberal dalam orgmas itu. Semestinya mereka tidak usah dibubarkan, tapi mereka sebaiknya membubarkan diri. Tapi selama masih dikucuri dana besar dari negara-negara asing gerakan mereka ini tidak akan berhenti.

Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi adanya perbedaan-perbedaan itu? Bisa Bapak jelaskan bagaimana Rasulullah memberikan teladan dalam menghadapi perbedaan, termasuk sikap Rasulullah terhadap orang-orang kafir?

---

Rasulullah tidak mentolerir perbedaan teologis dikalangan umat Islam waktu itu apalagi jika itu bertentangan dengan Islam. Sikap Rasulullah terhadap umatnya, jangan disamakan dengan sikapnya terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir, ya lakum dinukum wa liya din. Tapi tetap kerjasama dalam kehidupan sosial. Rasulullah misalnya pernah pinjam baju perang kepada Yahudi. Menyuaip nasi kepada Yahudi buta di sebuah pasar di Madinah.

Bagaimana agar persatuan umat Islam itu tercapai sehingga tidak ada lagi perbedaan di kalangan umat? Bukankah adanya perbedaan inilah yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat?

Menghilangkan perbedaan itu mustahil, tapi kan perbedaan harus tetap dalam koridor teologis yang benar. Dan benar tidaknya dapat diketahui dari sumber-sumber ilmu dalam Islam (Qur'an, Hadith, dan ijma' para ulama). Tapi saya tidak setuju kalau perpecahan hanya disebabkan oleh perbedaan. Fiqih kita ada empat mazhab yang berbeda, tapi tidak berarti umat Islam pecah jadi empat. Yang menyebabkan perpecahan bukan perbedaan, tapi kemiskinan ilmu. Ya lagi-lagi masalah ilmu. Karena kurang ilmu akhirnya suatu kelompok menyalahkan kelompok lain. Karena kurang ilmu juga akhirnya menjadi fanatik buta kullu hizmin bima ladayhim farihun. Kalau perbedaan itu diklarifikasi secara ilmiah maka sudah tentu tidak terjadi perpecahan. Dan jangan lupa unsur-unsur eksternal juga menjadi penyebab perpecahan umat Islam.

Bagaimana caranya agar umat Islam di Indonesia bisa maju? Adakah konsep-konsepnya?

Saya berpendirian bahwa Islam sebagai peradaban bangkit dan maju menguasai dunia, karena ilmu. Dan saya yakin bahwa penyebab kemunduran umat Islam saat ini adalah juga karena kemiskinan ilmu. Tidak berarti kita tidak berpendidikan tapi pendidikan yang kita terima bukan pendidikan Islam. Ilmu yang kita kuasai juga bukan ilmu yang berdasarkan pada prinsip epistemologi Islam. Mestinya semua ilmuwan Muslim bisa disebut ulama, tapi nyatanya kan tidak, karena memang banyak cendekiawan Muslim yang tidak memahami Islam. Oleh karena itu agar umat Islam maju, umat Islam harus mengembangkan ilmu-ilmu Islam. Ilmu dalam Islam adalah asas amal, amal tanpa ilmu akan mengakibatkan kerusakan. Dengan ilmu nanti akan lahir konsep-konsep yang berguna untuk meningkatkan amal-amal Islami. Dari situ nanti akan lahir peradaban Islam.

Apakah LSM/agen orientalis yang ada di Indonesia harus dibubarkan juga agar mereka tidak menyebarkan virus kesesatan? Selain dibubarkan bagaimana caranya untuk memberantas pikiran-pikiran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam?

Ya mestinya begitu, tapi dalam era perang pemikiran sekarang ini, segala tindakan perlu didasari dengan pemikiran juga. Yaitu kajian ilmiah intensif terhadap kegiatan LSM yang memang benar-benar menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan aqidah Islam. Disini peran dan otoritas MUI harus ditambah, jika tidak memungkinkan, Departemen Agama perlu mengambil peran ini. Jika tidak dengan cara pembubaran, maka langkah yang perlu diambil adalah melakukan perubahan dalam metodologi studi Islam, untuk tingkat perguruan tinggi. Pendekatan studi Islam ala orientalis perlu di ganti dengan pendekatan yang diderivasi dari tradisi intelektual Islam. Pada tingkat masyarakat awam perlu dikembangkan informasi sederhana tentang bahaya pemikiran liberal. Saya yakin masyarakat lama-lama akan dapat menghukumi pikiran-pikiran itu. Masyarakat muslim Indonesia sekarang sudah semakin cerdas.

Sekarang di Indonesia orang gemar menyebut istilah toleransi dan perbedaan pendapat. Sampai-sampai MUI yang mengharamkan Ahmadiyah banyak menuai kritik. Dalam batas apa umat Islam bisa bertoleransi?

---

Perlu dibedakan antara toleransi sesama penganut suatu agama dan toleransi dengan penganut agama lain. Seperti saya sebutkan diatas perbedaan masalah furu&rsquo; dalam Islam bisa ditolerir, tapi perbedaan masalah usul atau aqidah tidak bisa. Tapi Islam mentolerir perbedaan agama. Pengharaman MUI terhadap Ahmadiyah termasuk kedalam masalah usul. Tidak bisa dikategorikan kedalam toleransi beragama. Kalau kita bertoleransi terhadap segala bentuk kebebasan menginterpretasi Islam, kita tidak perlu Nabi dan ulama dong. Ini tidak sehat dan tentu tidak ilmiah. Dalam dunia kedokteran saja sekali dokter bilang &ldquo;flu burung&rdquo; itu berbahaya, semua orang tunduk. Kalau dokter bilang imunisasi perlu untuk bayi, semua orang akur, tapi ketika ulama berfatwa bahwa liberalisasi itu berbahaya, orang protes. Anda bisa bayangkan bagaimana lemahnya otoritas dalam bidang ilmu agama dibanding ilmu kedokteran.

Bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang Ahmadiyah?

Berdirinya Ahmadiyah saja sudah menimbulkan kecurigaan. Kedekatan Mirza Ghulam Ahmad dengan penjajah Ingeris sudah bisa menjawab mengapa mereka menghapuskan jihad. Penafsiran-penafsiran mereka terhadap al-Qur&rsquo;an juga penuh dengan interes. Pengakuan Mirza sebagai Nabi atau katakan penobatannya sebagai Nabi oleh pengikutnya, secara teologis problematis. Disini tentu tidak ada kamus toleransi. Sabda Nabi &ldquo;seandainya sesudah saya ada nabi, niscaya (nabi itu) adalah Umar&rdquo;; menunjukkan bahwa tidak akan ada Nabi sesudah Rasulullah, kalau pun ada pun bukan Mirza Ghulam Ahmad. Saya setuju dengan pengharaman MUI terhadap Ahmadiyah. Bahkan sebenarnya fatwa MUI ini agak terlambat. Rabitah Alam Islami, dalam konferensinya tahun 1974, memutuskan untuk menganggap Ahmadiyah sudah diluar Islam. Hal ini diikuti oleh fatwa-fatwa dari negara-negara lain, seperti fatwa fatwa of Shariah Council, Ingeris, fatwa Majma&rsquo; al-Fiqh al-Islami, Mesir, Fatwa of Islamic Fiqh Council, Afrika Selatan. Saya yakin fatwa mereka itu tidak salah.

Mengapa Ahmadiyah di Indonesia bisa membesar?

Bisa saja, sebabnya kembali kepada masalah tradisi ilmu. Disatu sisi masyarakat kita miskin ilmu, sementara Ahmadiyah, mungkin dengan bantuan Ingeris juga, menyebarkan pahamnya secara sistimatis. Rumusnya kan jelas al-haqq bila nidham akan kalah dengan al-batil bi-n-nidham. Tapi jangan salah-salah bisa membesar berarti benar.

Bagaimana pandangan Bapak tentang banyaknya kelompok-kelompok dalam Islam?

Banyaknya kelompok dalam Islam tidak masalah, asal tujuannya sama untuk izzatul Islam wal Muslimin. Tapi banyaknya kelompok menjadi berbahaya ketika setiap kelompok menjadi fanatik dengan kelompoknya dan apriori terhadap kelompok lain. Banyak kelompok akan sangat penting jika setiap kelompok mengambil bidang-bidang penting dalam perjuangan ummat. Atau kelompok-kelompok yang meminati berbagai bidang kajian keilmuan dalam Islam. Kita belum punya kelompok cendekiawan, misalnya. yang pakar sains Islam, politik Islam, ekonomi Islam, perbankan Islam dsb.

Peran MUI sebagai lembaga fatwa di Tanah Air banyak dipertanyakan, khususnya oleh mereka yang beraliran liberalisme, apa komentar Bapak?

Itu memang wajar, sebab salah satu ciri liberalisme yang menjadi anak kandung posmodernisme itu adalah anti-otoritas, anti struktur, bahkan menurut Huston Smith posmodernisme itu anti worldview. Malahan bukan hanya MUI saja yang dipertanyakan kelompok liberal, Uthman bin Affan yang membakukan mushaf al-Qur&rsquo;an juga dipertanyakan, Imam Syafii yang membuat metode pengambilan hukum Islam juga digugat.